



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	14 (<i>empat belas</i>)
Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM dengan menghadirkan PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT Jamkrindo
Hari, Tanggal	:	Kamis, 1 April 2021
Pukul	:	10.56 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Martin Manurung, S.E., M.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan BPUM dan Tindak Lanjut Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI di Jawa Tengah
Hadir	:	1. orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, 3. Dirut PT Jamkrindo, Putrama Wahyu Setyawan 4. Direktur Bisnis Mikro PT BRI (Persero) Tbk, Supari 5. Direktur Hubungan Lembaga PT BNI (Persero) Tbk, Sis Apik Wijayanto beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM serta Dirut PT Jamkrindo dan para Direksi PT BRI (Persero) Tbk dan PT BNI (Persero) Tbk pada pukul 10:56 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 1 April 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E., M.A.

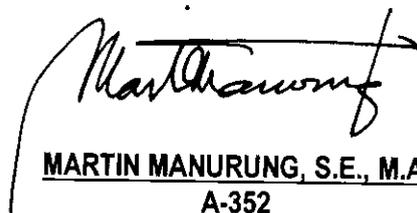
II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI meminta Menteri Koperasi dan UKM untuk merevisi Permenkop dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 terutama yang menyangkut lembaga pengusul Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 agar dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, tepat sasaran dan merata sehingga dapat menciptakan *multiplier effect* pada perekonomian nasional.
2. Komisi VI DPR RI meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., untuk meminimalisir kesalahan input data, agar dalam penyaluran BPUM 2021 dapat berjalan secara efektif, efisien, tepat waktu, dan tepat sasaran hingga ke daerah-daerah terluar, terpencil, dan terdepan di Indonesia sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk memprioritaskan calon penerima BPUM yang sudah ditetapkan pada tahun 2020 tetapi belum terealisasi, untuk menerima pada kesempatan pertama.
4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Jamkrindo, untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14:14 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,



MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.
A-352